

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian yang Digunakan**

##### **3.1.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi terkait dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020, p. 2).

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey. Berikut definisi metode kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020, 16-17) yaitu :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian survey digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Definisi penelitian survey yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020, 57) yaitu :

“Metode penelitian survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, kaarakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengambilan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan”.

Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian langsung pada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yakni Wilayah Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Tengah, Bandung Timur dan Bandung Utara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### **3.1.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dan dianalisis. Objek dari penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*, Modernisasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **3.1.3 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian, akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti, sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Berikut definisi penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Samsu (2017, 65) yaitu :

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata”.

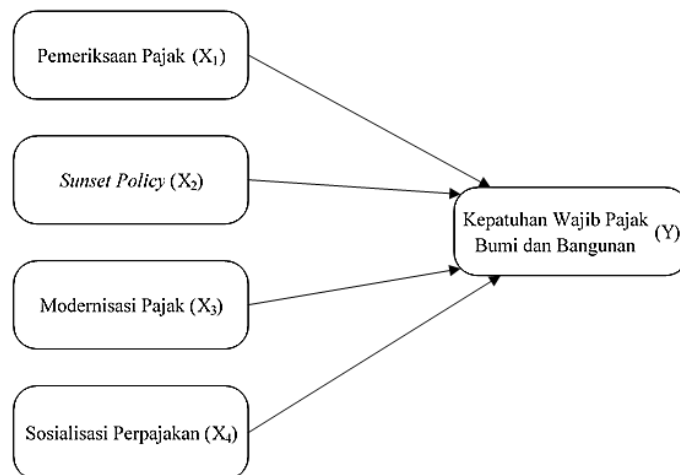
Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (*mean*).

Penelitian verifikatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Samsu, 2017, p. 126). Penelitian verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Guna mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji *t* (parsial).

#### **3.1.4 Model Penelitian**

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang akan dikemukakan oleh peneliti yaitu : “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*, Modernisasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”, maka untuk menggambarkan hubungan antar variabel independen dengan dependen, peneliti memberikan model penelitian yang ditunjukkan pada gambar 3.1 yaitu sebagai berikut :



Keterangan :

—————> : Pengaruh Parsial

**Gambar 3. 1**  
**Model Penelitian**

## 3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

### 3.2.1 Definisi Variabel dan Pengukurannya

Pada sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Definisi variabel penelitian dikutip dalam Sugiyono (2020, 68) yaitu : suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan judul yang dipilih oleh peneliti yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*, Modernisasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”, maka peneliti mengelompokkan variabel tersebut dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

### 3.2.1.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Berikut adalah definisi variabel bebas (*independent variable*) yang diungkapkan oleh Sugiyono (2020, 69) yaitu :

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Maka dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel independen yang diteliti, diantaranya adalah :

#### 1. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Waluyo (2020, 377-378) yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit). Sebagaimana telah diungkapkan dalam penelitian Prayatni & Jati (2016, 669) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus dapat memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel independen (pemeriksaan pajak), dikutip dalam Waluyo (2020, 377-378) yaitu :

- a. Standar Umum Pemeriksaan Pajak
- b. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- c. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

## 2. *Sunset Policy* (X<sub>2</sub>)

Berdasarkan penelitian yang telah diungkapkan oleh Agustin, Apriliawati, & Irawan (2021, 278) dikatakan bahwa program *sunset policy* PBB-P2 merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat wajib pajak PBB-P2 untuk berperilaku patuh, karena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan wajib pajak. *Sunset policy* dapat memberikan persepsi yang baik kepada wajib pajak PBB-P2.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel independen (*sunset policy*) dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diungkapkan oleh Usman & Puspita (2017) yaitu :

- a. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward The Behavior*)
- b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)
- c. Kontrol Perilaku Yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control*)

## 3. Modernisasi Pajak (X<sub>3</sub>)

Tujuan modernisasi pajak diungkapkan oleh Rahayu (2017, 119) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Optimalisasi pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, apabila pengelolaan

pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel independen (modernisasi pajak), dikutip dalam Rahayu (2017, 120-125) yaitu :

- a. Restrukturisasi Organisasi
  - b. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
  - c. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia
  - d. Pelaksanaan *Good Governance*
4. Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )

Definisi sosialisasi perpajakan yang dikemukakan oleh Widodo (2010, 52), dikatakan bahwa informasi merupakan jembatan pengetahuan, sehingga informasi yang diberikan kepada wajib pajak tidak hanya sekedar mengingatkan kewajiban membayar pajak tetapi untuk lebih mengarahkan kepatuhan pajak dari wajib pajak dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak.

Maka salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan, diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya khususnya wajib pajak (Winerungan, 2013, pp. 962-963).

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel independen (sosialisasi perpajakan), dikutip dalam Widodo (2010, 168-169) yaitu :

- a. Media Informasi
- b. Slogan

- c. Cara Penyampaian
- d. Kualitas Sumber Informasi
- e. Materi Sosialisasi
- f. Kegiatan Penyuluhan

### 3.2.1.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Definisi variabel terikat (*dependent variable*) yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020, 69) adalah sebagai berikut :

“Sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Rahayu (2017, 193) sebagai berikut : Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Widodo (2010, 9) sebagai berikut : Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.
3. Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Gunadi (2013, 94) sebagai berikut : Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai



kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel dependen (kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan), dikutip dalam Widodo (2010, 68-70) yaitu :

1. Kepatuhan Formal
2. Kepatuhan Material

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menguraikan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang dijadikan bahan penyusunan instrument kuesioner. Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*, Modernisasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”, terdapat 5 (lima) variabel yaitu :

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen ( $X_1$ )
2. *Sunset Policy* sebagai variabel independen ( $X_2$ )
3. Modernisasi Pajak sebagai variabel independen ( $X_3$ )
4. Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel independen ( $X_4$ )
5. Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel dependen (Y)

Di bawah ini adalah operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Variabel Independen : Pemeriksaan Pajak (X1)**

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item	
<p>Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit) (Waluyo, 2020, pp. 377-378)</p> <p>Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus dapat memperkuat kebenaran dari transaksi dan kepatuhan hukum dengan undang-undang yang berlaku agar wajib pajak tetap patuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya membayar pajak (Prayatni &amp; Jati, 2016, p. 669)</p>	1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak	a. Pelatihan pemeriksa pajak	Ordinal	1-2	
		b. Keterampilan pemeriksa pajak			
		c. Tanggung jawab d. Professional	Ordinal	3-4	
			e. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan	Ordinal	5
	2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik	Ordinal	6-7	
		b. Mendapat pengawasan yang saksama			
		Luas lingkup pemeriksaan ( <i>audit scope</i> ) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui :	Ordinal	8-9	
		c. Pencocokan data d. Konfirmasi berkenaan dengan pemeriksaan			
		e. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup	Ordinal	10	
			f. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan	Ordinal	11
		g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak	Ordinal	12-13	

		h. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak		
		i. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja	Ordinal	14
		j. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan	Ordinal	15
		k. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak	Ordinal	16-18
	3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak	a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara jelas	Ordinal	19-20
		b. Laporan Hasil Pemeriksaan dapat digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan	Ordinal	21
	<b>(Waluyo, 2020, pp. 377-378)</b>			

Tabel 3. 2

## Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen : *Sunset Policy* (X2)

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Program <i>Sunset Policy</i> PBB-P2 merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi niat wajib pajak PBB-P2 untuk berperilaku patuh, karena adanya manfaat atau keuntungan yang dapat dirasakan wajib pajak. <i>Sunset policy</i> dapat memberikan persepsi yang baik kepada wajib pajak PBB-P2 (Agustin, Apriliawati, & Irawan, 2021, p. 278)	1. Sikap Terhadap Perilaku ( <i>Attitude Toward The Behavior</i> )	a. Penilaian yang menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan b. Penilaian yang tidak menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan	Ordinal	22-24
	2. Norma Subjektif ( <i>Subjective Norm</i> )	a. Tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan perilaku tersebut	Ordinal	25-26

		b. Tekanan sosial yang dirasakan untuk tidak melakukan perilaku tersebut		
	3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan ( <i>Perceived Behavioral Control</i> )	a. Kemudahan yang dirasakan dalam melakukan perilaku	Ordinal	27-29
		b. Mencerminkan pengalaman masa lalu	Ordinal	30-31
		c. Hambatan yang diantisipasi	Ordinal	32
		<b>(Usman &amp; Puspita, 2017)</b>		

**Tabel 3. 3**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Variabel Independen : Modernisasi Pajak (X3)**

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Modernisasi sistem administrasi pajak bertujuan untuk menerapkan <i>good governance</i> dan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Optimalisasi pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, apabila pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi <b>(Rahayu, 2017, p. 119)</b>	a. Restrukturisasi Organisasi	a. Debirokratis pelayanan	Ordinal	33
		b. Struktur organisasi berbasis fungsi	Ordinal	34-35
	b. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	a. <i>Standar Operating Procedures (SOP)</i>	Ordinal	36-37
		b. Penerapan <i>system</i>	Ordinal	38-40
		c. Pengembangan SIDJP	Ordinal	41
	c. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia	a. Melakukan pemetaan kompetensi	Ordinal	42-43
		b. Seluruh jabatan dievaluasi	Ordinal	44
		c. Beban kerja dari masing-masing jabatan dianalisis	Ordinal	45
		d. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir	Ordinal	46

	d. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	a. Pembuatan kode etik pegawai	Ordinal	47-48
		b. Penegakan kode etik pegawai		
	c. Pembentukan <i>complaint center</i>	Ordinal	49-50	
<b>(Rahayu, 2017, pp. 120-125)</b>				

Tabel 3. 4

## Operasionalisasi Variabel

## Variabel Independen : Sosialisasi Perpajakan (X4)

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<p>Informasi merupakan jembatan pengetahuan, sehingga informasi yang diberikan kepada wajib pajak tidak hanya sekedar mengingatkan kewajiban membayar pajak tetapi untuk lebih mengarahkan kepatuhan pajak dari wajib pajak dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak (Widodo, 2010, p. 52)</p> <p>Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan, diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya khususnya wajib pajak (Winerungan, 2013, pp. 962-963)</p>	1. Media Informasi	a. Media televisi;	Ordinal	51
		b. Media koran;	Ordinal	52
		c. Media spanduk;	Ordinal	53
		d. Media <i>Flyers</i> (brosur);	Ordinal	54
		e. Media <i>billboard/mini billboard</i> ;	Ordinal	55
		f. Media radio	Ordinal	56
	2. Slogan	a. Slogan yang digunakan bersifat ajakan	Ordinal	57
		b. Slogan lebih ditekankan pada “manfaat pajak” yang diperoleh	Ordinal	58
	3. Cara Penyampaian	a. Dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat	Ordinal	59
		b. Menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin	Ordinal	60-61
	4. Kualitas Sumber Informasi	a. <i>Call Center</i>	Ordinal	62
		b. Penyuluhan	Ordinal	63-64
		c. Internet	Ordinal	65
		d. Petugas Pajak	Ordinal	66-67
	5. Materi Sosialisasi	Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak	Ordinal	68-69
	6. Kegiatan Penyuluhan	a. Metode yang digunakan adalah metode diskusi	Ordinal	70

		b. Media yang dipergunakan adalah proyektor	Ordinal	71
		c. Materi yang disampaikan adalah pengetahuan perpajakan	Ordinal	72
		d. Penyuluh/pembicara harus sudah menguasai materi	Ordinal	73
<b>(Widodo, 2010, pp. 168-169)</b>				

Tabel 3. 5

## Operasionalisasi Variabel

## Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak <b>(Widodo, 2010, p. 9)</b>	1. Kepatuhan Formal	a. Kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri	Ordinal	74-75
		b. Tepat waktu dalam membayar pajak	Ordinal	76-77
		c. Tepat waktu dalam melaporkan pembayaran pajak	Ordinal	78-79
	2. Kepatuhan Material	a. Wajib Pajak mengisi SPT dengan jujur	Ordinal	80-81
		b. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan	Ordinal	82-83
<b>(Widodo, 2010, pp. 68-70)</b>				

Indikator-indikator di atas akan diuraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada alternative jawaban dalam kuesioner. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa : skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan rasio (Sugiyono, 2020, p. 146).

Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka maupun variabel yang diukur oleh suatu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert. Berikut definisi skala likert yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020, 146) yaitu :

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”.

Pada setiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan memperoleh skala pengukuran ordinal untuk variabel  $X_1$  (Pemeriksaan Pajak), variabel  $X_2$  (*Sunset Policy*), variabel  $X_3$  (Modernisasi Pajak), variabel  $X_4$  (Sosialisasi Perpajakan) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan). Kriteria bobot penilaian dari setiap pernyataan yang akan dijawab responden dalam kuesioner ditunjukkan pada tabel 3.6, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3. 6**  
**Instrumen Penelitian Kuesioner**

No.	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif	5
2.	Setuju/Sering/Positif	4
3.	Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral	3
4.	Tidak Setuju/Pernah/Negatif	2
5.	Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak Ada	1

Sumber : Sugiyono (2020, 147)

Instrument penelitian dengan menggunakan skala likert dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk *checklist* agar lebih efisien dalam mengisi kuesioner tersebut.

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.3.1 Populasi Penelitian

Definisi populasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020, 126) adalah sebagai berikut :

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Jadi populasi bukan cuma orang, tetapi juga objek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek ini. Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*, Modernisasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petugas pengelola pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang lokasinya tersebar pada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni Wilayah Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Tengah, Bandung Timur dan Bandung Utara yang ditunjukkan pada tabel 3.7 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3. 7**  
**Jumlah Populasi**

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Sub Bidang PBB	10
2.	UPTD Wilayah Bandung Barat	9
3.	UPTD Wilayah Bandung Selatan	10



4.	UPTD Wilayah Bandung Tengah	6
5.	UPTD Wilayah Bandung Timur	8
6.	UPTD Wilayah Bandung Utara	12
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>

Sumber : Data Rekapitulasi Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021, diolah oleh peneliti

### 3.3.2 Sampel Penelitian

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Sugiyono (2020, 127) menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus mewakili (*representative*). Penentuan jumlah sampel dari populasi dalam penelitian ini digunakan sampel jenuh. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 55 orang, maka sampel yang digunakan adalah sebesar jumlah populasi.

### 3.3.3 Teknik Sampling

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Sugiyono (2020, 128-131), teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Berikut terdapat dua teknik sampling yang digunakan yaitu :

1. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling* (*sampling* berdasarkan daerah).
2. *Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan biasanya dilakukan ketika jumlah populasi relatif kecil atau ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2020, p. 133).

### **3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Sumber Data**

Sumber data merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumbernya yang dikutip dalam Sugiyono (2020, 194), data dibedakan menjadi dua yaitu : (1) primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data; dan (2) sekunder merupakan

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dalam penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, yang lokasinya tersebar pada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah yakni Wilayah Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Tengah, Bandung Timur dan Bandung Utara.

### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2020, p. 194).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara penelitian lapangan. Studi lapangan (*field research*) dalam penelitian dikaitkan dengan sumber data primer. Untuk memperoleh informasi serta hasil penelitian yang diharapkan, peneliti melakukan studi lapangan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Berikut penjelasan terkait ketiga teknik tersebut yang dikutip dalam Sugiyono (2020, 195-203) yaitu :

1. Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
2. *Interview* (Wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
3. Observasi (Pengamatan) digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

### **3.5 Rancangan Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Definisi analisis data yang diungkapkan oleh Sugiyono (2020, 206) yaitu sebagai berikut :

“Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah : mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data yang dilakukan peneliti meliputi analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif
  - a. Menganalisis Pemeriksaan Pajak
  - b. Menganalisis *Sunset Policy*
  - c. Menganalisis Modernisasi Pajak
  - d. Menganalisis Sosialisasi Perpajakan
  - e. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
2. Analisis Verifikatif
  - a. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
  - b. Menganalisis seberapa pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
  - c. Menganalisis seberapa pengaruh modernisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
  - d. Menganalisis seberapa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Menyusun pernyataan atau kuesioner.
2. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dan masing-masing indikator akan dijabarkan kepada bagian yang bersangkutan dengan masalah yang diuji, dimana

masing-masing indikator memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai berbeda, tiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor menghasilkan skala pengukuran ordinal. Tiap jawaban dibutuhkan skor 1 sampai dengan 5.

3. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  dan  $Y$ , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini dapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Penilaian pada variabel  $X$  dan  $Y$ , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dalam jumlah responden. Rumus rata-rata (*mean*) yang dikutip dalam Sugiyono (2020, 247) adalah sebagai berikut :

$$me = \frac{\sum X_i}{n}$$

$$me = \frac{\sum Y_i}{n}$$

Keterangan :

$Me$  = *Mean* (rata-rata)

$\Sigma$  = Sigma (jumlah)

$X_i$  = Nilai  $X$  ke  $i$  sampai ke  $n$

$Y_i$  = Nilai  $Y$  ke  $I$  sampai ke  $n$

$N$  = Jumlah Responden

Persamaan rata-rata (*mean*) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing diambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikaitkan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5).

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. Langkah-langkah dalam menentukan rentang interval dikemukakan oleh Sudjana (2005, 47) yaitu sebagai berikut :

1. Tentukan rentang, ialah data terbesar yang dikurangi data terkecil.
2. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas sering diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilih berdasarkan keperluan. Cara lain yang cukup bagus untuk  $n$  berukuran besar  $n > 200$ , misalnya dapat menggunakan aturan *sturges*, yaitu banyak kelas =  $1 + (3,3) \log n$ .
3. Tentukan panjang kelas interval.
4. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan.

Dengan demikian, maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-masing variabel adalah :

a. Kriteria untuk menilai Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )

Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 21 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 21) = 105$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 21) = 21$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{105 - 21}{5} = 16,8$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 8**  
**Kriteria Pemeriksaan Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
21 – 46,8	Tidak Sesuai Standar
37,8 – 54,6	Kurang Sesuai Standar
54,6 – 71,4	Cukup Sesuai Standar
71,4 – 88,2	Sesuai Standar
88,2 - 105	Sangat Sesuai Standar

b. Kriteria untuk menilai *Sunset Policy* ( $X_2$ )

Untuk menilai variabel *sunset policy* dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 11 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 11) = 55$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 11) = 11$$



Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{55 - 11}{5} = 8,8$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel *Sunset Policy* ( $X_2$ ) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 9**

**Kriteria *Sunset Policy***

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
11 – 19,8	Tidak Baik
19,8 – 28,6	Kurang Baik
28,6 – 37,4	Cukup Baik
37,4 – 46,2	Baik
46,2 – 55	Sangat Baik

c. Kriteria untuk menilai Modernisasi Pajak ( $X_3$ )

Untuk menilai variabel modernisasi pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 18 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 18) = 90$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 18) = 18$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{90 - 18}{5} = 14,4$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Modernisasi Pajak ( $X_3$ ) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 10**  
**Kriteria Modernisasi Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
18 – 32,4	Tidak Modern
32,4 – 46,8	Kurang Modern
46,8 – 61,2	Cukup Modern
61,2 – 75,6	Modern
75,6 – 90	Sangat Modern

d. Kriteria untuk menilai Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ )

Untuk menilai variabel sosialisasi perpajakan dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 23 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 23) = 115$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 23) = 23$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{115 - 23}{5} = 18,4$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 11**  
**Kriteria Sosialisasi Perpajakan**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
23 – 41,4	Tidak Baik
41,4 – 59,8	Kurang Baik
59,8 – 78,2	Cukup Baik
78,2 – 96,6	Baik
96,6 – 115	Sangat Baik

- e. Kriteria untuk menilai Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)

Untuk menilai variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 10 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 10) = 50$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 10) = 10$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{50 - 10}{5} = 8$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 12**

**Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
10 – 18	Tidak Patuh
18 – 26	Kurang Patuh
26 – 34	Cukup Patuh
34 – 42	Patuh
42 – 50	Sangat Patuh

### 3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas dan reabilitas instrumen penelitian merupakan hal yang utama dalam meningkatkan efektivitas proses pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel (*reliable*), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

### 3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2020, pp. 175-176).

Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku. Syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria, dikemukakan oleh Sugiyono (2020, 189-190) adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $r \geq 0,30$ , maka item-item pernyataan kuesioner adalah valid.
- b. Jika  $r < 0,30$ , maka item-item pernyataan kuesioner adalah tidak valid.

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment*, yang dikutip dalam Sugiyono (2020, 246) yaitu sebagai berikut :

$$r = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x \cdot \Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi pearson

$\Sigma xy$  = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\Sigma x / \Sigma y$  = Jumlah variabel x / y

$\Sigma x^2 / \Sigma y^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel x / y

n = Banyaknya sampel

### 3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yang disebut dengan pengukuran yang reliabel (*reliable*). Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) yang dikutip dalam Rochaeaty (2007, 54) dengan menggunakan *software* SPSS, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan :

$k$  = Jumlah soal atau pernyataan

$\sigma_i^2$  = Variasi setiap pernyataan

$\sigma_x^2$  = Variasi total tes

$\sum \sigma_i^2$  = Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pernyataan.

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel (*reliable*) jika koefisien variabelnya lebih dari 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel. Apabila dalam uji coba instrumen sudah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

### 3.5.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Menstransformasikan data dari ordinal ke interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya berkala interval. Teknik informasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Succesive Interval*) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pernyataan dihitung frekuensi dari setiap pilihan jawaban.
2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, hitung proporsi dari setiap pilihan jawaban.
3. Berdasarkan proporsi tersebut untuk setiap pernyataan, hitung proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
4. Pada setiap pernyataan, tentukan nilai untuk Z dalam setiap pilihan jawaban.
5. Menghitung *scala value* (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban dengan menggunakan rumus :

$$Scale Value = \frac{(\text{Kepadatan pada batas bawah} - \text{Kepadatan pada batas atas})}{(\text{Daerah di bawah batas atas} - \text{Daerah di bawah batas bawah})}$$

6. Menghitung skor transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval untuk setiap pilihan jawaban, dengan rumus :

$$Skala = Scale Value + [Scale Value_{\text{minimum}}]^{+1}$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala berdasarkan perubahan skala terkecil diperoleh *Transformed Scaled Value*.

### 3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

#### 3.6.1 Rancangan Analisis

Rancangan analisis untuk mengetahui korelasi dari lima variabel yang diteliti dalam lingkup penelitian pengaruh pemeriksaan pajak, *sunset policy*, modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah dengan perhitungan statistik.

##### 3.6.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2020, 258) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan)

a = Bilangan Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Variabel Bebas (Pemeriksaan Pajak)

X<sub>2</sub> = Variabel Bebas (*Sunset Policy*)

X<sub>3</sub> = Variabel Bebas (Modernisasi Pajak)

X<sub>4</sub> = Variabel Bebas (Sosialisasi Perpajakan)

e = Kesalahan (*Error*)

### 3.6.1.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dengan  $Y$  secara bersamaan. Berdasarkan Sugiyono (2020, 246) analisis korelasi ganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x \cdot \Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan :

- $r$  = Koefisien korelasi pearson
- $\Sigma xy$  = Jumlah perkalian variabel  $x$  dan  $y$
- $\Sigma x$  = Jumlah variabel  $x$
- $\Sigma y$  = Jumlah variabel  $y$
- $\Sigma x^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel  $x$
- $\Sigma y^2$  = Jumlah pangkat dua nilai variabel  $y$
- $n$  = Banyaknya sampel

Berdasarkan nilai  $r$  yang diperoleh, maka dapat dihubungkan  $-1 < r < 1$  yaitu sebagai berikut :

1. Apabila  $r = 1$ , artinya terdapat hubungan antara variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$  dan variabel  $Y$ .
2. Apabila  $r = -1$ , artinya terdapat hubungan antara variabel negatif.
3. Apabila  $r = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan korelasi.

Taksiran besarnya hubungan atau korelasi antara variabel, ditunjukkan pada tabel 3.13 yaitu sebagai berikut :



**Tabel 3. 13**  
**Taksiran Besarnya Koefisien Korelasi**

Besarnya Pengaruh	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2020, 248)

### 3.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari variabel yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ), pemilihan tes statistik, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan (Sugiyono, 2020, p. 99).

#### 3.6.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji $t$ )

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan  $t$  tabel  $t$  hitung. Berdasarkan Sugiyono (2020, 248) uji  $t$  secara parsial dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan :

$t$  =  $t$  hitung yang dikonsultasikan dengan  $t$  tabel

$r$  = Nilai korelasi

$n$  = Jumlah sampel

Model pengambilan keputusan dalam penelitian ini, ditentukan menggunakan statistik uji  $t$  dengan melihat asumsi sebagai berikut :

1. Peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan taraf kepercayaan 95% atau interval keyakinan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05.
2. Derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n - k$
3. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan masing-masing  $t$  hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan  $t$  tabel.
  - a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak (terima  $H_a$ )
  - b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima (tolak  $H_a$ )

Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Pengujian pengaruh parsial dilakukan uji satu arah (*one tail test*) yaitu uji pihak kanan dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

### **Hipotesis 1**

$H_0 : \beta_1 \leq 0$ , artinya Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( $Y$ ).

$H_a : \beta_1 > 0$ , artinya Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan ( $Y$ ).

**Hipotesis 2**

$H_0: \beta_1 \leq 0$ , artinya *Sunset Policy* ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

$H_a: \beta_2 > 0$ , artinya *Sunset Policy* ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

**Hipotesis 3**

$H_0: \beta_1 \leq 0$ , artinya Modernisasi Pajak ( $X_3$ ) tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

$H_a: \beta_3 > 0$ , artinya Modernisasi Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

**Hipotesis 4**

$H_0: \beta_1 \leq 0$ , artinya Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

$H_a: \beta_4 > 0$ , artinya Sosialisasi Perpajakan ( $X_4$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

**3.6.2.2 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis korelasi telah diketahui, maka langkah berikutnya adalah menghitung koefisien determinan, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  $X_1$  (Pemeriksaan Pajak),  $X_2$  (*Sunset Policy*),  $X_3$  (Modernisasi Pajak),  $X_4$  (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan).

Berdasarkan Sugiyono (2020, 249) koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Dimana :  $0 \leq r^2 \leq 1$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinan atau seberapa jauh perubahan variabel terikat

$R^2$  = Koefisien Korelasi

Koefisien Determinan (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai KD yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu Pemeriksaan Pajak, *Sunset Policy*, Modernisasi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dinyatakan dalam persentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan *Statistic Program for Social Science* (SPSS).

### **3.7 Rancangan Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam uji laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang diketahui. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Rancangan kuesioner yang dibuat oleh peneliti, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Peneliti menggunakan jenis kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian.

Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih kuesioner terdiri dari 21 pernyataan mengenai pemeriksaan pajak, 11 pernyataan mengenai *sunset policy*, 18 pernyataan mengenai modernisasi pajak, 23 pernyataan mengenai sosialisasi perpajakan dan 10 pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.